

MEMBANGUN DIALOG PERDAMAIAN PAPUA MELALUI PENDEKATAN BUDAYA

Gerdha Numbery

Pendahuluan

Penyelesaian konflik di Papua hingga kini tak kunjung terselesaikan. Beberapa langka telah ditempuh melalui pendekatan keamanan maupun pendekatan kesejahteraan masyarakat lokal namun belum dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Papua. Selain kedua pendekatan tersebut, sebenarnya di tahun 1960-an Koentjaraningrat, yang pernah melakukan penelitian pada etnik-etnik Papua saat itu, sudah merekomendasikan penerapan pendekatan budaya sebagai respon atas terjadi perubahan-perubahan sosial budaya sebagai dampak dari penerapan model kebijakan *top down*. Akibat dari perubahan sosial budaya tersebut menimbulkan perasaan kurang puas, sikap pasif, apatis, regresif, juga timbul sikap agresif hingga konflik dari masyarakat lokal terhadap pemerintah dan pihak swasta yang mengelola sumber daya alam di tanah Papua (Koentjaraningrat 1993:433).

Kondisi ini berlangsung hingga memasuki era reformasi, tepatnya di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2011. SBY mengusulkan pendekatan non militer Papua sebagai model penyelesaian konflik. Pendekatan ini dilakukan melalui cara dialog. Selanjutnya pendekatan dialog ini disambut baik oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) karena dipandang sebagai pendekatan baru. Pendekatan ini sekaligus dapat merepresentasikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal dalam menyelesaikan konflik-konflik internal yang selama ini terjadi dalam masyarakat lokal Papua.

Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 yang dilaksanakan oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia, FISIP UI, LIPI dan Sekretariat Wakil Presiden RI, mencatat 5 hal terkait budaya Papua yang tercermin dalam dialog nanti, yaitu 1) dialog harus mampu mempertahankan identitas-identitas budaya Papua; 2) dialog harus mampu membuka ruang gerak budaya Orang Papua; 3) Terdapat keragaman persepsi budaya mengenai cara dan mekanisme berdialog politik; 4) Perlu diwujudkan suatu dialog yang mengarah kepada proses rekonsiliasi dan proses permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat Papua di masa lalu; dan 5) dialog harus

mampu merekonstruksi paradigma negara yang melihat Papua selalu sebagai bangsa separatis yang mengusik keutuhan negara.¹

Ke lima point di atas, barangkali bisa dikatakan sebagai fondasi suatu bangunan yang disebut “*dialog perdamaian*”. Bagaimana mendapatkan material (unsur-unsur budaya) yang diperlukan untuk fondasi bangunan tersebut? Pertanyaan tersebut mengantarkan penulis untuk melihat dan mengkaji unsur-unsur budaya lokal Papua yang dapat disumbangkan dalam dialog perdamaian/penyelesaian konflik.

Pendekatan Budaya

Dalam dunia antropologi bahkan kajian ilmu-ilmu terapan lainnya di Indonesia, fenomena narasi lokal atau budaya lokal atau kearifan lokal merupakan suatu pendekatan atau strategi yang selama ini dipakai oleh para akademisi, birokrat atau pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan atau bahkan juga dalam rangka penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan ini sebagai “jalan masuk” dalam mencari solusi bagi masalah-masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan (Marzali, 2007:7)

Pemanfaatan pendekatan budaya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat ketika terjadi berbagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.. Pendekatan budaya adalah pendekatan yang mengutamakan kebudayaan sebagai media atau alat pembangunan. Dengan pendekatan ini dikemukakan bahwa kebudayaan lokal dapat dan harus digunakan sebagai media dalam penyelesaian konflik yang memungkinkan dapat berlangsung dengan sukses, karena: 1) Unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional dimata orang-orang yang terlibat dalam konflik; 2) Unsur-unsur budaya secara simbolik merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari masyarakat lokal setempat; dan 3). Unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi yang sering dijadikan sebagai sarana dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini dapat berjalan dengan adanya ketersediaan data dasar atau material berupa aspek-aspek budaya masyarakat lokal.

Pendekatan ini bukanlah suatu model atau strategi yang baru, karena hampir di belahan dunia juga memanfaatkan pendekatan ini. Meskipun pendekatan ini telah dilakukan dalam lingkup yang luas namun dalam konteks Papua pastilah unsur-unsur

¹ Lihat: (<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/586-pendekatan-budaya-koentjaraningrat-untuk-penyelesaian-konflik-papua.html>)

budaya yang diangkat sebagai model atau strategi tersebut memiliki warna atau corak yang berbeda dan memiliki energi dalam suatu bangunan dialog perdamaian.

Papua dalam Keberagaman Etnik dan Kebudayaan

Antara kebudayaan dan manusia tak dapat dipisahkan. Kebudayaan menjadi pusat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia menciptakan kebudayaan sebagai respon dari kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, terbentuklah berbagai pranata budaya seperti pranata ekonomi, pendidikan, perkawinan, kekerabatan, religi dan lainnya. Masing-masing pranata budaya terdiri atas 3 gejala budaya yaitu, sistem budaya (*idea*), sistem sosial (*activity*) dan kebudayaan materi (*artifact*).

Etnik-etnik yang tersebar di wilayah Papua, umumnya memiliki, mengembangkan dan mewarisi kebudayaannya masing-masing berdasarkan pola interaksinya dengan lingkungan alamnya. Persebaran kelompok etnik Papua dapat dikategori berdasarkan karakteristik ekologi dan budaya. Seperti kategori berdasarkan 4 zona ekologi wilayah Papua (Tukher, 1987) dan wilayah sosial budaya seperti berdasarkan kategori bahasa, kepemimpinan tradisonal dan kesenian (Koetjraningrat, 1993). Kategori lainnya adalah pembagian orang Papua ke dalam 7 wilayah adat yaitu 1) Wilayah Adat Mamta; 2) Wilayah Adat Saireri; 3) Wilayah Adat Doomberai; 4) Wilayah Adat Bomberai; 5) Wilayah Adat Anim-Ha; 6) Wilayah Adat La-Pago dan 7) Wilayah Adat Mee-Pago.

Keberagaman etnik dan kebudayaan lokal di Papua memberikan kesadaran pada kita bahwa kedua keberagaman yang saling melekat tersebut merupakan kondisi dasar yang selama ini belum maksimal disentuh kedalamannya. Walaupun sudah ada yang terjangkau namun kemungkinan masih berada pada tataran permukaannya saja. Ada kecenderungan juga, seseorang lebih suka menggeneralisasikan aspek-aspek budaya tertentu untuk disamakan dengan etnik yang berbeda. Contohnya, istilah pemimpin tradisonal *big man* yang lebih tepat digunakan dalam kebudayaan suku bangsa di Pegunungan Tengah namun digunakan juga simbol kebudayaan lain. Begitu juga, istilah *ondoafi* atau kepemimpinan tradisonal di wilayah Tabi, dipakai juga untuk menyebut pemimpin lokal di luar wilayah Tabi dan masih banyak contoh-contoh spesifik lainnya yang ikut membuat keruh pemahaman kebudayaan dan kelompok etnik Papua.

Membicarakan keberagaman etnik dan kebudayaan Papua sebagai kondisi dasar, tentunya masih banyak konsep-konsep kebudayaan lainnya secara spesifik harus dipahami secara jelas dan sistematis. Selanjutnya diharapkan pemahaman kita tentang konsep-konsep kebudayaan tersebut akan menjadi model atau strategi yang diusulkan

dalam berbagai kebijakan pemerintah dalam merencanakan dialog perdamaian atau membantu penyelesaian konflik yang sering terjadi dalam masyarakat lokal Papua.

Unsur-unsur Budaya dalam Dialog Penyelesaian Konflik Papua

Pada dasarnya upaya pemanfaatan pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik Papua adalah ketersediaan data dasar (unsur-unsur budaya lokal) kebudayaan Papua. Dari beberapa kajian etnografi Papua dapat dijadikan data dasar kebudayaaa sebagai “*jalan masuk*” dalam proses penyelesaian konflik Papua. Data dasar tersebut misalnya terkait dengan unsur kebudayaan “sistem Organisasi Sosial dan Keekerabatan”. Beberapa narasi lokal yang dapat dimanfaatkan adalah,

- a. Sistem Kepemimpinan Politik Tradisional. Kajian yang dilakukan oleh Mansoben (1995) mengungkapkan terdapat empat tipe politik yaitu 1) tipe kepemimpinan *big man* ; 2) tipe kepemimpinan kerajaan; 3) tipe kepemimpinan *Ondoafi* dan 4) tipe kepemimpinan campuran. Masih perlu ada kajian mendalam, bagaimana keterlibatan tokoh-tokoh politik tersebut dalam penyelesaian konflik. Selain kepemimpinan politik tersebut masih terdapat pemimpin adat memiliki fungsi dalam urusan adat seperti dalam kebudayaan Hubula di Lembah Baliem terdapat tokoh adat kesuburan, tokoh adat perang dan tokoh adat perdamaian). Ada juga kepemimpinan berbasis kelompok keturunan, selain *Ondoafi*, terdapat juga pemimpin-pemimpin Klen/*Keret* yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan *Ondoafi*. Pemimpin-pemimpin di tingkat klen/keret, biasanya memiliki peran-peran yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau hak dalam menguasai dan mengelola ruang hidup/sumber daya alam tertentu. Perbedaan dan keragaman kepemimpinan ini harus dipahami secara jelas dan sistematis untuk melibatkan mereka dalam ruang dialog/negosiasi dalam penyelesaian konflik.
- b. Ruang Dialog. Dalam beberapa kebudayaan lokal di Papua terdapat ruang-ruang khusus untuk berkumpul, bermusyawarah terkait persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Orang Hubula, mengenal *wim aila* (rumah perang) tempat di mana mereka merencanakan dan mengatur strategi untuk berperang atau *pilamo adat* sebagai tempat berdiskusi / bermusyawarah terkait persoalan hidup yang dihadapinya. Dengan adanya ruang yang difungsikan sebagai tempat bermusyawarah, maka sebaiknya dalam upaya dialog/penyelesaian konflik tidak

di bawah keluar dari lingkungan wilayah adatnya, Ruang dialognya juga menjadi bagian yang terintegrasi dengan aspek budaya yang lainnya.

- c. Mekanisme Penyelesaian. Beberapa kebudayaan mengenal mekanisme penyelesaian konflik dengan menggunakan, istilah *para-para* adat untuk beberapa suku di wilayah adat Mamta, atau satu tungku tiga batu (suku-suku bangsa di wilayah adat Bomberai). Dalam mekanisme seperti ini, dipastikan aktor-aktor budaya yang terlibat adalah mereka yang memiliki kapasitas secara adat dalam penyelesaian konflik.

Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, tampak saat ini posisi penyelesaian konflik berada pada wacana dialog perdamaian. Seperti yang diungkapkan dalam Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011, terdapat 5 hal penting yang perlu diperhatikan dalam dialog tersebut, maka untuk mendukung hal tersebut, perlu dikaji secara mendalam unsur-unsur budaya yang dapat digunakan sebagai pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik di Papua.

Keberagaman etnik dan kebudayaan lokal di Papua dapat dikatakan sebagai kondisi dasar dalam menentukan dan mengangkat konteks kelokalan sebagai model pendekatan budaya. Unsur-unsur budaya yang diangkat dan memiliki potensi sebagai model/strategi penyelesaian konflik di Papua antara lain sistem organisasi sosial dan kekerabatan. Dalam unsur budaya ini, terdapat konsep-konsep budaya seperti pemimpin tradisonal, yang memiliki kapasitas dalam penyelesaian konflik, dan konsep ruang serta mekanisme berdialog. Konsep budaya ini menjadi identitas kultur orang Papua, sekaligus model pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik. Sebaiknya konsep-konsep ini menarasikan budaya lokal tidak berfokus pada kategori-kategori persebaran etnik Papua (secara ekologi, atau berdasarkan aspek kebudayaan atau pembagian wilayah adat) sebab ini akan menciptakan unsur-unsur budaya yang bersifat generalisasi. Untuk konteks ini, sebaiknya ditawarkan konsep-konsep budaya yang lebih spesifik yang sifatnya lokalitas agar supaya persoalan tersebut dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dumatubun, A.E, 2012, *Perspektif Budaya Papua*, Penerbit CV. Intan Mandiri.
- Koentjaraningrat 1993, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Masinambow, E.K. M, 1997, *Koentjaraningrat dan Antropologi diIndonesia*, Asosiasi Antropologi Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Marzali Amri, 2005, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta.